

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|---------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Indopos |

PDIP Tolak Bansos Uang Tunai

JAKARTA—Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono dari Fraksi PDIP menolak gagasan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat Mujiyono tentang penggantian bantuan sosial (Bansos) untuk warga terdampak sosial Covid-19. Sebelumnya Mujiyono mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah bantuan sosial dari bentuk sembako menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Gembong keberatan atas wacana itu. Menurutnya bantuan sosial dalam bentuk pangan sudah tepat. Di musim pandemi ini Masyarakat Jakarta kata Gembong lebih membutuhkan pasokan sembako ketimbang dana tunai. "BLT tidak cocok. Prioritas bantuan pemerintah saat ini adalah dalam menjaga perut warga terdampak Covid-19," kata Gembong, Kamis (7/5/2020).

Politisi senior PDIP ini mengaku pilihan untuk memberi bantuan berupa pangan lebih masuk akal. Pihaknya mendukung langkah Gubernur Anies Baswedan untuk tetap menyalurkan kebutuhan bahan pokok supaya warga tak disibukan lagi dengan harus membeli kebutuhan sehari-harinya dan tak perlu keluar rumah selama penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota.

"Jadi ya sembako itu pilihan rasional," ucapnya. Meski mengaku mendukung Anies Baswedan, namun Gembong meminta agar data penerima manfaat yang sudah dimutakhirkan saat harus betul-betul diveri-



BLT tidak cocok. Prioritas bantuan pemerintah saat ini adalah dalam menjaga perut warga terdampak Covid-19."

Gembong Warsono
Anggota Komisi A DPRD DKI

fikasi dengan teliti supaya sejumlah kejadian pada penyaluran Bansos pada tahap I di April 2020 lalu tak terulang kembali.

Memang pendistribusian sembako tahap pertama sempat menuai sejumlah masalah misalnya penyaluran yang tak tepat sasaran dan molornya waktu pendistribusian. "Pemprov harus memperbaiki data penerima Bansos, sehingga tepat sasaran," ucapnya.

Pada penyaluran Bansos tahap II ini Pemprov DKI mengaku memutakhirkan data penerima dengan melibatkan perangkat RT/RW. Ada penambahan jumlah penerima dari yang semula 1,2 jiwa kini bertambah menjadi dua juta orang. Kategori penerimanya adalah warga miskin dan rentan miskin atau kelompok masyarakat yang berpenghasilan Rp5 juta per bulan.

"Jangan sampai satu nama mendapatkan empat paket Bansos," ucapnya. Meski Pemprov DKI memutuskan untuk tetap memberi sembako, namun ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono masih ngotot mengusulkan bantuan sosial tahap II ini bebentuk uang tunai.

Menurut Mujiyono apabila bantuan diberikan berupa BLT maka lebih menguntungkan para penerima manfaat. Nilai bantuan kata dia bakal lebih besar karena tak pakai ongkos kirim, tak ada ongkos untuk pengemas paketan dan biaya tak terduga lainnya. Selain itu pendistribusiannya tak rumit karena karena BLT diberikan dengan cara transfer.

"Pertama dengan BLT nilai akan lebih gede. Karena enggak ongkos distribusi, beli kardus enggak ada. Bisa jadi uang. Bisa fleksibel. Dia enggak butuh beras, dia butuh lauk. Kalau dapat Rp600 bisa diirit, belanja sebagian dan lain-lain," kata Mujiyono di Jakarta, Kamis (7/5/2020)

Kendala Suplai

Mujiyono mengusulkan agar bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak Covid-19 diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Penyaluran BLT tersebut dapat melalui pemberian tunai atau transfer melalui bank.

Menurut Mujiyono, hal tersebut



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|---------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Indopos |

PDIP Tolak Bansos Uang Tunai

berkaca dari pengalaman bansos dalam bentuk paket sembako pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap pertama. "Ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan bansos tahap pertama yang menyebabkan bansos tersebut tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Bansos tahap pertama direncanakan selesai pada 18 April 2020 terpaksa dimundurkan sampai dengan 24 April 2020," ujar Mujiyono, di Jakarta.

Mujiyono menyebutkan, terdapat dua kendala dalam penyaluran bansos berupa paket sembako. Pertama, penyedia bahan kebutuhan, yakni Perumda Pasar Jaya dan mitra terkait seperti Transmart dan Lottemart kesulitan menyediakan paket kebutuhan, karena kendala suplai barang dan hambatan teknis lainnya.

"Kedua, ada kendala dalam pengiriman paket ke penerima bansos, misalnya karena pengiriman paket terlambat datang sehingga pihak RW minta agar paket tersebut dikirim keesokan harinya," ungkap dia.

Oleh karena itu, kata Mujiyono, lebih baik Pemprov DKI mempertimbangkan bansos diberikan dalam bentuk BLT atau transfer tunai. Menurut dia, terdapat sejumlah keuntungan dengan bansos dalam bentuk BLT atau transfer. Keuntungan itu antara lain, pemerintah daerah terhindar dari kesulitan untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok warga secara langsung. Kemudian, biaya distribusi dan pengemasan

barang bisa dihemat, sehingga jumlah bantuan yang diterima lebih maksimal.

"Keuntungan lain, adalah warga penerima mendapatkan kebebasan untuk menentukan prioritas kebutuhannya masing-masing selama Covid-19. Pemberian dalam bentuk uang tunai akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dapat menghidupkan perekonomian kecil di sekitar tempat tinggalnya, seperti warung kecil, warung makan, dan sebagainya," jelas dia.

Langsung Transfer

Menurut Mujiyono, skema BLT dalam bentuk transfer bank atau diberikan secara tunai, pertama, Dinas Sosial/kelurahan/RW meminta data nomor rekening dari salah satu anggota keluarga dari 1.194.633 keluarga penerima bantuan, atau warga lain yang menjadi penerima bantuan.

Kedua, untuk keluarga yang memiliki nomor rekening, bantuan diberikan secara tranfer dan bagi keluarga yang tidak memiliki nomor rekening, maka bantuan diberikan secara tunai. Ketiga, pemberian BLT dilakukan selama satu bulan dengan total bantuan tunai yang diberikan sebesar Rp 598.000 (Rp149.500 X 4). Keempat, penguatan pengawasan penerima bantuan dapat dilakukan dengan memublikasikan nama-nama penerima sosial di kantor kelurahan, balai RW, maupun melalui portal media sosial resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kelima, disediakan sebuah hotline khusus untuk melaporkan penyimpangan pemberian BLT terhadap

pemberian bantuan sosial tersebut.

"Keenam, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan pihak Polri dan kejaksaan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dalam pemberian bantuan sosial tersebut," cetus Mujiyono.

Dikatakan, pemberian BLT ini tentunya mengasumsikan bahwa penerima bantuan akan keluar rumah untuk membeli barang kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, kata dia, penerapan protokol Covid-19 di tempat tinggal harus diterapkan lebih tegas.

"Bahkan apabila diperlukan dikenakan sanksi pencabutan bantuan sosial, jika keluarga penerima bantuan tersebut tidak mematuhi protokol Covid-19 di lingkungan tempat tinggalnya," tegasnya.

Selain itu, kata Mujiyono, Pemprov DKI Jakarta perlu menjamin kestabilan harga-harga kebutuhan pokok dengan melakukan operasi pasar, terutama di kawasan padat penduduk dan ekonomi lemah. Pelaksanaan operasi pasar harus menerapkan protokol Covid-19 secara ketat, yakni dengan menjaga jarak aman.

"Penyediaan masker kain harus menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta dan dimasifkan penggunaannya di masyarakat dengan memberikan masker secara gratis untuk seluruh warga DKI Jakarta. Jika saat ini ada sebanyak 11.063.324 warga DKI Jakarta dan masing-masing diberikan 2 buah masker @Rp 5.000, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 110 miliar," pungkasnya. (dri)